

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Oleh:

JULLYANA SAID

921 409 199

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

ABSTRAK

Jullyana Said, 2013. *“Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Gorontalo”*. Skripsi, Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Di bawah bimbingan Bapak Imran R. Hambali, S.Pd, SE, MSA, selaku Pembimbing I dan Bapak Rio Monoarfa, SE.Ak, M.Si selaku pembimbing II. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Gorontalo dalam kaitannya dengan pencapaian antara pendapatan dan realisasi anggaran. Dimana Anggaran Pendapatan tiga tahun terakhir mengalami pencapaian positif yakni realisasi anggarannya melampaui target anggarannya, sedangkan anggaran belanja mengalami kondisi yang kurang baik, yakni realisasinya melampaui target yang berindikasi terjadi inefisiensi. Dapat dilihat bahwa secara umum pengelolaan BLU di Universitas Negeri Gorontalo telah memenuhi tuntutan teknis sebagaimana diatur dalam aturan tentang itu. Dari hasil penelitian ini, menemukan pelaksanaan BLU sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan pengelolaan anggaran telah mendapatkan pengakuan dari kementerian keuangan, hal ini sebagaimana penyampaian Pembantu Rektor II di beberapa kesempatan.

kata kunci :Pelaksanaan, BLU, UNG.

Pendahuluan

Perguruan Tinggi adalah bagian dari lembaga pelayanan publik, yang dalam pengelolaan keuangan tetap mengacu pada ketentuan UU Perbendaharaan Negara. Wacana tentang pengelolaan perguruan tinggi yang mengarah ke BHP (Badan Hukum Perguruan Tinggi) kini ditiadakan, dan mengarah pada pengelolaan keuangan yang berorientasi layanan umum atau biasa dikenal dengan Badan Layanan Umum. Penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diperguruan tinggi, tentunya memiliki implikasi penting bagi sistem akuntansi dan keuangan organisasi. Termasuk pula dalam proses penganggaran sebagai salah satu elemen dalam pengelolaan keuangan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang diusung sebagai prinsip penting yang harus dikedepankan, menuntut lembaga publik dengan pengelolaan keuangan badan layanan umum mereformasi sistem dan re-designing pola-pola keuangan lembaga dengan dukungan infrastruktur dan Teknologi Informasi (TI), sebagai senjata ampuh dalam menciptakan informasi termasuk informasi akuntansi dan keuangan untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan *trust* dari masyarakat.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, sudah mulai menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), konsekuensinya pola-pola lama dalam penganggaran dalam organisasi harus dirubah dengan pola penganggaran baru yang lebih detil dan akurat. Mengingat sistem pengelolaan keuangan BLU ini lebih mengedepankan kinerja yang efektif, transparansi dan akuntabel. Orientasi dari BLU ini adalah merubah paradigma penganggaran dan mempersiapkan infrastruktur yang dapat mendukung terciptanya informasi anggaran yang terpercaya serta bagaimana mengaitkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibuat sebelumnya.

Sebagai acuannya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) hal sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 69 ayat (7) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

publik, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit lembaga yang melakukan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu bentuk dan modelnya beraneka macam. Jenis BLU disini antara lain lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, rumah sakit, dan lain-lain.

Salah satu target dari perguruan tinggi negeri saat ini adalah kualitas pelayanan yang baik. Ini menjadi salah satu indikator untuk menilai bahwa perguruan tinggi tersebut masuk dalam perguruan tinggi yang baik. Sejauh ini, di beberapa lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, sebagian besar telah menggunakan BLU sebagai upaya untuk meningkatkan layanan dan kinerja perguruan tinggi memenuhi tuntutan tersebut diatas.

Universitas Negeri Gorontalo, adalah lembaga perguruan tinggi dan saat ini sudah menerapkan pengelolaan keuangan dengan menggunakan badan layanan umum (BLU), maka profesionalitas serta kualitas pelayanan menjadi konsekuensinya. Penerapan BLU di satker Universitas Negeri Gorontalo menuntut perubahan yang baik dalam pengelolaan keuangan antara lain adalah bagaimana mengoptimalkan dan mengefisiensi pelaksanaan anggaran yang diperoleh untuk menunjang operasional dan akademi perguruan tinggi.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pencapaian antara pendapatan dan realisasi anggaran. Anggaran pendapatan 3 tahun terakhir mengalami pencapaian positif yakni realisasi anggarannya, melampaui target anggarannya, sedangkan anggaran belanja mengalami kondisi yang kurang baik, yakni realisasinya melampaui target yang berindikasi terjadi inefisiensi

Berdasarkan fakta tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) pada Satuan Kerja Universitas Negeri Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yakni pelaksanaan anggaran Universitas Negeri Gorontalo sebagai satker badan layanan umum, terutama untuk belanja berindikasi inefisiensi

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, peneliti dapat merumuskan masalah yakni bagaimana evaluasi pelaksanaan anggaran dengan menggunakan badan layanan umum di Universitas Negeri Gorontalo?

Mengacu pada rumusan masalah tersebut diatas, peneliti dapat menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pengelolaan keuangan dengan menggunakan Badan Layanan Umum di Universitas Negeri Gorontalo.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan dengan menggunakan badan layanan umum (BLU) yang berorientasi pada kinerja lembaga yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak Universitas Negeri Gorontalo dalam hal pemberian informasi terkait dengan pengelolaan keuangan dengan menggunakan badan layanan umum.

Mulyadi (dalam Halim, 2001:65). Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Supriyono (dalam Oktavia, 2009) merupakan suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal, dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu umumnya satu tahun.

Halim,(2001:23) mengemukakan manajer menengah dan bawah tahu dan bersedia dengan penuh kesadaran untuk mencapai standar yang sudah ditetapkan dalam anggaran. Dalam tahap implementasi ini, juga diperlukan kerja samadan koordinasi agar anggaran dapat diimplementasikan dengan baik

BPKP (2005), menyatakan bahwa penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam system penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada public. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Mariana (dalam Susilo, 2007), Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan system penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan public, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan public. Hatry (dalam Asmoko 2006) menggunakan istilah penganggaran berbasis hasil (*results-based budgeting*), sedangkan Osborne dan Gaebler (1992) menggunakan istilah penganggaran untuk hasil (*budgeting for results*), PBK dapat dikatakan merupakan hal baru karena pusat perhatian diarahkan pada outcome dan mencoba untuk menghubungkan alokasi sumber daya secara eksplisit dengan outcome yang ingin dicapai (Hatry, 1999) dalam Asmoko (2006). Definisi PBK yang diungkapkan oleh Smith (Dalam Asmoko, 2006) bahwa anggaran kinerja menghubungkan pengeluaran dengan hasil.

Pengertian atau definisi BLU diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :“Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari asal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat”.

Status hukum BLU tidak terpisah dari instansi induknya dan beroperasi berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk. Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLU. Oleh karena itu, kementerian negara/lembaga/pemerintah harus menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja layanan dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

Robinson (2002) menyebutkan prakondisi yang harus dimiliki untuk memberhasilkan implementasi *performance based budgeting* yaitu: (1) sistem informasi kinerja yang baik; (2) penyusunan indikator kinerja yang baik; (3) sistem akuntansi manajemen yang baik; (4) evaluasi dan alat analisis. Afriana (2009) melakukan penelitian tentang analisis pelaksanaan anggaran berbasis kinerja studi kasus pada dinas kesehatan kota Sawohunto.

Pengelolaan keuangan dengan mengadopsi badan layanan umum (BLU) adalah upaya pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dimana lembaga atau badan diberikan kemandirian untuk mengelola keuangan sendiri dan merencanakan didasarkan pada tingkat kebutuhan yang diinginkan, dan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam BLU itu sendiri. Output yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan BLU ini adalah kinerja lembaga yang lebih baik dan professional. Dengan demikian, harapannya Universitas Negeri Gorontalo dalam

meningkatkan kinerja kearah yang lebih baik, khususnya pelayanan kepada mahasiswa.

Metode Penulisan

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami, metode ini menjadikan peneliti sebagai instrument kunci, dan ciri dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang didasarkan pada fakta-fakta dokumen maupun pengamatan selama di lokasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a). Data primer: yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh dan mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan pejabat yang secara teknis bertanggungjawab dan mengetahui pengelolaan keuangan model BLU serta staf di bagian keuangan yang ada di Univesitas Negeri Gorontalo; b). Data sekunder: yaitu data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan. Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain data-data petunjuk teknis pengelolaan keuangan BLU dan model-model laporan keuangan BLU sebagaimana yang digunakan di Universitas Negeri Gorontalo.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1). Teknik wawancara, dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian 42 ri Gorontalo, khususnya yang memahami secara teknis penelitian ini tentang pengelolaan keuangan model Badan Layanan Umum (BLU); 2). Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian mengacu pada teknis analisis yang dikemukakan oleh Mason (dalam Efferin, dkk, 2004:147) yaitu

analisis dokumen. Analisis ini merupakan analisis dokumen yang dapat merupakan dokumen tertulis yang dijadikan sebagai bahan informasi berdasarkan pada relevansi dari data dalam dokumen itu. Dengan pendapat tersebut, maka data laporan keuangan atau data-data keuangan seperti pendapatan asli daerah tepat untuk menggunakan analisis ini.

Hasil Penelitian

Pengelolaan keuangan sebuah lembaga memiliki sifat kehati-hatian. Sifatnya pada dasarnya mengingatkan pada para pengelola atau penanggungjawab atas keuangan ataupun anggaran itu pada posisi sesuai dengan mekanisme atau petunjuk teknis. Hal ini bukan saja pada sistem pengelolaan dari keuangan Negara tetapi dalam kegiatan usaha pun memiliki hal yang sama, semata-mata agar anggaran yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Universitas Negeri Gorontalo merupakan lembaga Negara yang bergerak di bidang pendidikan, dan saat ini dalam pengelolaan keuangannya menerapkan sistem BLU. Dalam penelitian ini, lebih melihat efektivitas pengelolaan BLU sejak penerapannya pada tahun 2009. Namun untuk itu, peneliti mengawali dengan konsep pentingnya badan layanan umum (BLU), hal ini dapat mengutip hasil wawancara dengan Kabang Keuangan UNG Tahirun Katili, berikut kutipan wawancaranya: “Saya tidak bisa menjabarkan lebih detail tentang definisi BLU, yang pasti bahwa BLU itu adalah bentuk pelayanan yang mengedepankan efektivitas dan tidak terikat pada prosedur pengelolaan keuangan yang konvensional dan berorientasi pada hasil, dan sistemnya feleksibel dan didasarkan pada RBA yang telah disusun. Jadi sederhananya, BLU itu dapat mengelola keuangan dari pendapatannya sendiri tanpa harus menunggu juknis dan persetujuan dari kementerian keuangan, dan tetap mengacu pada sistem keuangan yang ada dalam BLU”, Juni 2013.

Selanjutnya, untuk melihat penyelenggaraan BLU, peneliti dapat menggunakan beberapa hal diantaranya:

- 1). Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penggaran dalam system BLU pada prinsipnya sama dengan apa yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan seperti halnya perguruan tinggi. Universitas Negeri Gorontalo, sejak tahun 2009 telah mencanangkan pengelolaan keuangan dengan system BLU. Dalam perencanaan BLU dikenal dengan rencana strategis, yang nanti akan berwujud dalam rencana bisnis anggaran (RBA). Dalam semua program yang disusun dalam RBA tersebut telah tertuang dalam renstra unit kerja dimaksud, dimana di UNG setiap unit kerja memiliki renstra sendiri-sendiri dengan tetap mengacu pada pengembangan akademik;

2). Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran BLU, dalam penelitian ini lebih membahas secara umum berdasarkan pada argumentasi atau responden dari para informan, yang berkompeten pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimanakan dalam peraturan BLU meliputi seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas dan jumlah dan kualitas barang atau jasa. Untuk melihat dokumen pelaksanaan di UNG sebagai salah satu pengguna sistem BLU, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang memahami dan sebagai decision making dalam unit kerja itu;

3). Pendapatan dan Belanja BLU

Pengelolaan BLU, pendapatan dan belanja lembaga atau unit kerja sangat penting untuk diketahui. Karena pada dasarnya semua pendapatan yang ada akibat dari pelayanan yang diberikan, dan sifatnya bukan PNBPN, dapat dikelola langsung untuk anggaran BLU. Proses seperti ini yang membedakan dengan pengelolaan keuangan diluar sistem BLU;

4). Pengelolaan Kas, pengelolaan Piutang dan Utang serta Investasi

Didalam BLU semua praktek bisnis yang sehat menjadi bagian dari pelaksanaan anggaran dengan baik. Jadi, BLU tidak hanya mengenai perencanaan dan penganggaran serta pendapatan, tetapi hal-hal teknis sangat diperhatikan oleh lembaga. Misalnya masalah pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan bahkan sampai pada utang serta investasi. Semua unsur-unsur tersebut harus dilaksanakan

dengan baik, Karena ini menjadi bagian dari prayarat utama dalam pengelolaan keuangan serta mendapat persetujuan dari kementerian keuangan. UNG sendiri menurut kabag keuangan, semua elemen yang disebutkan di atas telah memenuhinya dengan baik, karena bila tidak dipenuhi hal-hal tersebut, maka dalam tahun anggaran 2013 misalnya tidak akan mendapat persetujuan dari kementerian keuangan. Dengan persetujuan dari kementerian keuangan sebagai pihak yang bertanggungjawab pada keuangan Negara, menganggap UNG telah memnuhi syarat untuk tindak lanjut anggaran BLU;

5). Pengelolaan Barang BLU

Pengelolaan barang dalam BLU sedemikian rupa diatur. Ini penting, agar semua barang memiliki kejelasan dalam penggunaannya, pengelolaannya. Dalam pengelolaan barang di BLU, itu mulai dari pengadaan sampai pada penghapusan, karena semua asset yang dimiliki itu harus dilaporkan kondisinya sampai benar-benar barang yang ada sudah bisa di musnakan atau dihapus;

6) Akuntansi dan Pelaporan atau Pertanggungjawaban Keuangan BLU

Akuntansi menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan BLU. Sebagaimana yang umumnya dikenal, terkadang di beberapa tempat lembaga pemerintah, system akuntansi menjadi kurang penting, sehingga yang terjadi adalah tingginya kesalahan administrasi keuangan di level pemerintah, dan berakibat pada dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan keuangan Negara. Universitas Negeri Gorontalo, sebagai produsen sarjana termasuk akuntansi di dalamnya, sejauh ini telah menggunakan system akuntansi dengan baik, baik sebelum penerapan BLU maupun sudah menggunakan BLU.

Pembahasan

Universitas Negeri Gorontalo sebagai lembaga pendidikan yang tujuannya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai. Dalam menjalankan fungsi kelembagaan, tidak terlepas dari aturan-aturan yang mengacu pada sistem yang ada pada kementerian pendidikan dan kebudayaan. Disamping itu juga, segala hal yang berhubungan dengan anggaran, kementerian pendidikan dan kebudayaan yang mengarahkan sesuai dengan petunjuk kementerian keuangan.

BLU adalah sebuah sistem yang dibangun oleh pemerintah yang penerapannya diwajibkan kepada seluruh lembaga seperti perguruan tinggi yang layak dan memenuhi syarat untuk itu. Jadi sebuah lembaga atau instansi pemerintah dapat menjadi BLU setelah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kriteria tersebut terbagi menjadi tiga jenis yaitu substantif, teknis, dan administratif. Dengan demikian, Universitas Negeri menjadi bagian dari itu dan telah memenuhi syarat teknis untuk menerapkan sistem BLU.

Penerapan BLU di Universitas Negeri Gorontalo dimulai sejak tahun 2009, dalam perjalanannya tidak serta merta langsung efektif seperti yang telah dialami sekarang, dan efektifnya sebagaimana hasil penelitian ini yakni sejak tahun 2011. Banyak hal yang menyebabkan hal tersebut, seperti kondisi sumber daya manusia belum mengetahui secara teknis termasuk juga pada setiap tahun mengalami perubahan sistem. Kondisi ini dinilai sebagai salah satu hal utama yang menyebabkan UNG belum optimal pada tahun-tahun awal menyelenggarakan BLU.

Untuk evaluasi pelaksanaan BLU sebagaimana fokus utama dalam penelitian ini, peneliti melihat dan telah melakukan analisis tentang tahapan-tahapan dan proses pengelolaan BLU dengan baik. Dari hasil analisis terlihat bahwa untuk tahun-tahun anggaran 2009-2010 pengelolaan BLU di Universitas Negeri Gorontalo belum berjalan dengan baik, dan penyebabnya telah dijelaskan di atas. Namun untuk tahun anggaran 2011 – 2013 sudah berjalan dengan baik. Artinya adanya rekomendasi pelaksanaan BLU berarti secara teknis telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam aturan BLU itu sendiri. Lebih rinci peneliti akan menjelaskan lebih detail sebagai berikut:

- Perencanaan dan penganggaran, dalam prakteknya yang terjadi adalah UNG telah melakukan perencanaan dengan baik serta bentuk-bentuk penganggarnya sebagaimana tuntutan BLU, hal ini dibuktikan revisi RBA terjadi apabila penyesuaian dengan anggaran perubahan;
- Dokumen pelaksanaan anggaran, secara teknis Universitas Negeri Gorontalo telah memenuhi kebutuhan dan syarat dokumen yang dibutuhkan, misalnya

saja belanja, proyeksi arus kas dan jumlah dan kualitas barang atau jasa semua itu telah dipenuhi dengan baik.

- Pendapatan dan belanja, Pengelolaan Kas, pengelolaan Piutang dan Utang serta Investasi. Hal-hal ini telah dipenuhi dengan baik oleh lembaga Universitas Negeri Gorontalo, artinya semua yang disebutkan tersebut telah dilaksanakan oleh lembaga melalui unit-unit kerja yang ada dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
- Hal yang sama pula pada pengelolaan barang BLU dan Akuntansi dan Pelaporan atau Pertanggungjawaban Keuangan BLU. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa pengelolaan dua persyaratan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan temuan hasil penelitian tersebut di atas, maka evaluasi umum yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah telah memenuhi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan BLU di Universitas Negeri Gorontalo.

SIMPULAN DAN SARAN

Didasarkan pada pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan BLU dari tahun 2009-2010 belum berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya penunjang serta pemahaman unsur pimpinan pada unit-unit kerja masih relatif kurang;
2. Mengacu pada pengelolaan BLU yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun, Universitas Negeri Gorontalo sebagai pengguna BLU telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, artinya semua persyaratan utama sudah berjalan dengan baik;

Berdasarkan pada simpulan tersebut di atas, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan BLU sebagai solusi pengelolaan keuangan khusus yang berhubungan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, karena akan mewujudkan sistem pemerintah yang bersih dan transparan;

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih jauh mengevaluasi tentang daya serap anggaran yang ada di Lembaga Universitas Negeri Gorontalo sebagai lembaga yang menggunakan BLU.

DAFTAR PUSTAKA

- Depkeu., 2006. *Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum*. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006. Jakarta.
- Depkeu., 2006. *Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 10/PMK.02/2006. Jakarta
- Depkeu., 2006. *Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006. Jakarta
- Halim, Abdul. 2001, *Akuntansi Keuangan Daerah*; Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Joko Supriyanto dan Suparjo, “*Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat*”, disarikan dari Acara Workshop Penyusunan RPP tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit ANDI
- _____. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*; Edisi Dua Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- _____. 2003. *Akuntansi sektor Publik*; Yogyakarta: penerbit Andi Offset
- Osborne, David dan Gaebler, T., 2003. *Mewirauaskan Birokrasi. Mentraformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*. Jakarta: PPM
- Pemerintah RI., 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
- PMPK FK UGM., 2010. Modul Pelatihan Rencana Bisnis Dan Anggaran
- Supriyanto, Djoko dan Suparjo, “*Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Pemikiran Baru atas Unit Pelayanan Masyarakat*”, disarikan dari Acara Workshop

Penyusunan RPP tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).